

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penelitian tentang kinerja keuangan, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas terhadap kesejahteraan masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah membutuhkan kajian teori sebagai berikut :

1. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban. Definisi lain menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (*dppka.jogjaprov.go.id*).

Hubungan Teori Akuntabilitas dengan penelitian ini adalah bahwa teori tersebut menjelaskan kewajiban dari penguasa yang dipercayai untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan

kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat, hal ini berkaitan dengan penelitian pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Judul tersebut mengacu pada proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah puncak dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat di daerah dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki daerah untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah. Karena semangat dari otonomi daerah adalah

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga negara yang selama masa pemerintahan orde baru lebih bercorak sentralistis (Jakarta minded).

Lebih dari satu dasawarsa, sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan, telah banyak hal yang terjadi di daerah. Pemerintah terlihat juga terus berupaya untuk selalu mengembangkan pola dan sistem pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pendek kata, desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Strategi pembangunan daerah membangun daerah tentu tidak bisa serampangan dilakukan. Perlu strategi yang terukur dan sistematis agar bisa mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Beberapa hal yang penting yang dapat dipedomani didalam implementasi strategi pembangunan daerah.

Pertama, pemihakan kepada rakyat (pro rakyat). Strategi ini merupakan salah satu pendekatan paling tepat untuk percepatan pembangunan daerah. strategi pemihakan berhubungan erat bagaimana pemerintah daerah turut membuka ruang keterlibatan atau partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Pemihakan juga menjadi penting mengingat otonomi daerah memang ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya. Pemihakan juga sangat krusial bagi pembangunan, terutama untuk daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang umumnya rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia. Pemihakan juga sangat penting untuk memperkecil kesenjangan antara wilayah relatif cepat berkembang dengan pulau-pulau kecil di wilayah

perbatasan. Pada tahapan ini, pemihakan akan diarahkan untuk memperbaiki dan memperkuat berbagai program pemerintah dalam membangun daerah.

Kedua, melaksanakan pembenahan terhadap seluruh aspek penting daerah, seperti aset, sumber daya dan birokrasi. Pembenahan dinilai sebagai salah satu strategi yang akan mendukung program pembangunan di daerah, apa saja yang perlu dibenahi yaitu dalam koridor reformasi pemerintahan, pembenahan diarahkan pada reformasi institusional, mekanisme dan kinerja pelayanan dari berbagai institusi publik berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government* sehingga semua institusi ini dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Regulasi-regulasi daerah yang dinilai tidak relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah harus disesuaikan, pembenahan juga menjadi strategi didalam membangun struktur pemerintahan dan wilayah, terutama untuk wilayah yang baru dimekarkan dalam kerangka struktur pemerintahan, pemerintah harus menerapkan prinsip pemerintahan berbasis kinerja dan rekrutmen PNS serta promosi pejabat berdasarkan kompetensi dan track record. Dalam koridor reformasi ekonomi, pembenahan dilakukan untuk menyokong kepentingan yang menjadi basis ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur dasar ekonomi, seperti pasar dan sistem, selain itu pembenahan atas perjanjian - perjanjian perdagangan dan kerjasama seperti *Border Crossing Agreement* perlu untuk dilakukan. Selain itu, pembenahan juga ditujukan untuk memangkas kebijakan-kebijakan dan regulasi penyebab biaya ekonomi tinggi, rencana

tata ruang wilayah (RTRW), penyiapan master plan di setiap bidang pembangunan sektor-sektor ekonomi strategis. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan lokasi-lokasi industrial estate, kemudahan pengurusan pertanahan, penciptaan insentif untuk investor serta penerbitan perda investasi daerah. Pembenahan juga diarahkan untuk bagaimana memanfaatkan dan mengelola sumberdaya sehingga membawa kemaslahatan kepada masyarakat daerah.

Ketiga, melaksanakan percepatan pembangunan daerah, dengan merancang skala prioritas terhadap aspek-aspek pembangunan daerah. Percepatan juga diarahkan terutama didalam memicu investasi dan pengembangan kegiatan-kegiatan sektor riil dan sektor ekonomi unggulan. Adanya percepatan, terutama dalam bidang ekonomi akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin serta jumlah pengangguran.

Keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu memaksimalkan kemampuan daerah didalam pembangunan. Teknologi yang banyak dikelola saat ini adalah dalam bentuk e-commerce. Hal ini tentu ditujukan dalam rangka penguatan kelembagaan perbaikan kualitas produk andalan daerah. Prinsip Pembangunan Daerah didalam mengimplementasikan strategi pembangunan daerah, pemerintah harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip penting, terutama dalam aspek orientasi pembangunan daerah. Terdapat beberapa prinsip penting didalam melaksanakan strategi pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Willem, 2004).

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah sesuatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan posisi – posisi kinerja yang berkelanjutan. Kinerja keuangan juga merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi, apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja yang dilakukan terlaksana semakin tinggi resiko kemandiriannya, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PDA (Pendapatan Asli Daerah). (Suryana, 2015)

4. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).

Jenis-jenis Dana Perimbangan

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi (UU no.33 tahun 2004). Secara definisi DAU diartikan sebagai berikut (Sidik, dalam Kuncoro, 2004). Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. 2) Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. 3) Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralkan ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh daerah. Henley, et.al (dalam Mardiasmo, 2004) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk grant kepada pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geo-graphical equity).
- 2) Untuk meningkatkan akuntabilitas (promote accountability)
- 3) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif.
- 4) Untuk meningkatkan keberterimaan (acceptability) pajak daerah.

Pengalokasian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Dimana daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang relative lebih rendah agar dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam era otonomi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan

antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

b. Dana Bagi Hasil

Dana bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21. Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), banyak Negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Adapun alokasi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan bagian daerah menurut peraturan menteri keuangan no. 23/PMK.07/2009 adalah penerimaan Negara dari

pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.

c. Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam

Dana bagi Hasil Sumber daya alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DAK memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya di mana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK. Berdasarkan klasifikasi Hyman, DAK dapat dikategorikan sebagai matching grant karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus restricted grant karena karakternya sebagai categorical grant-in-aid. (Swandewi, 2004)

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan tersebut tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan dapat kita lihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi di bidang sosial. Pertumbuhan Ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional.

Suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan kehidupan masyarakatnya yang lebih baik. Lalu apakah suatu negara yang mengalami gejala perkembangan ekonomi berpengaruh terhadap perkembangan suatu bisnis? Tentu saja iya, karena perubahan

dari perekonomian masyarakat akan mempengaruhi permintaan persediaan barang dan jasa suatu bisnis (Mirza, 2012).

6. Disparitas pendapatan antar daerah

Aspek “keadilan dan pemerataan” dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, tetapi juga dapat ditinjau menurut antardaerah. Secara interpersonal, menunjukkan apakah pendapatan antar individu atau kelompok anggota masyarakat sudah adil dan merata. Sementara itu antar daerah menunjukkan pemerataan yang terjadi antar daerah, baik antar propinsi maupun antar kabupaten/kota. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) yang terbaru (neraca SNSE), terlihat bahwa kesenjangan antar daerah terlihat makin memburuk, baik ditinjau dari berbagai indikator seperti pendapatan perkapita antar daerah, konsumsi per kapita antar daerah, maupun banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Distribusi pendapatan menguraikan bagaimana tingkat pendapatan masyarakat pada suatu negara ditinjau dari tiga segi, yaitu :

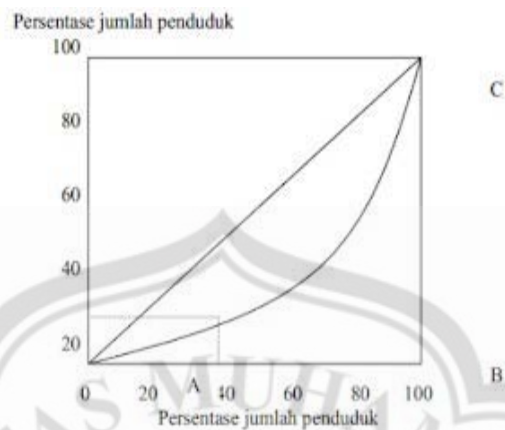
- a. Pembagian pendapatan antar golongan pendapatan (Size distribution of income) atau ketimpangan pendapatan secara relatif.
- b. Pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan (Urban rural income disparities).
- c. Pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*).

Jadi pada prinsipnya distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Secara umum terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai tingkat distribusi yang dimaksud, yaitu :

- a. Kurva Lorenz
- b. Indeks Gini
- c. Kriteria bank dunia

Kurva Lorenz akan menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduknya secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk.

Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata, sebaliknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung) maka mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.



Keterangan : Titik A mencerminkan 40% penduduk berpendapatan terendah menghasilkan atau memiliki 20% pendapatan nasional

Sumber : BPS,2017

Indeks Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (Semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain pihak, koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang. Angka rasio Gini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga OBC, semakin melengkung kurva Lorenz, akan semakin luas area yang dibagi, rasio Gininya akan semakin besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang kian timpang. (BPS, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

N O	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Restianto (2011)	Dependen : Alokasi belanja dan Pertumbuhan ekonomi Independen : Kinerja keuangan	Hasil penelitian tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
2	Swandewi (2012)	Dependen : Keserasian anggaran dan Kesejahteraan masyarakat Independen : Dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di provinsi Bali
3	Mirza (2012)	Dependen : Indeks pembangunan manusia Independen : Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan Belanja Modal	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009
4	Arka(2015)	Dependen : Kesejahteraan masyarakat Independen : Pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwadisparitas pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Bali
5	Ranis G(2004)	Dependen : Human development Independen : Growth and its impact	Growth and impact will have a positive effect on human development
6	Thronton,Jhon (2006)	Dependent : Economic growth Independen : Fiscal desentralizati	Revenues over which sub-national governments have full autonomy, its impact on economic growth is not statistically significant
7	Hartono (2008)	Dependen : Provinsi Jawa Tengah Independen : Ketimpangan pembangunan ekonomi	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa analisis ketimpangan pembangunan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan di Jawa Tengah

Lanjutan tabel 2.1

8	Jayastra (2015)	Dependen : Kesejahteraan Masyarakat Independen : Jumlah Pennduduk, Dana Perimbangan dan Investasi	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat
9	Restiawan (2013)	Dependen : Kecamatan di kabupaten Gianyar Independen : Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	Dari hasil penelitian tersebut bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan Ketimpangan Pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan pada kecamatan di Kabupaten Gianyar
10	Sasana (2009)	Dependen : Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan antar daerah dan Tenaga Kerja Terserap	Hasil penelitian analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap berpengaruh positif terhadap kesejahteraan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
11	Suciati dkk (2015)	Dependen : Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja langsung pada Kabupaten/Kota di Bali Independen : Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi	Dalam peneliian ini Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Bali
12	Sewandewi (2014)	Dependen : Keserasian anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Independen : Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah	Dana perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Keserasian anggaran dan dana Perimbangan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat
13	Yasa dkk (2015)	Dependen : Kesejahteraan Masyarakat Independen : Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan antar daerah	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Disparitas Pendapatan antar daerah berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan masyarakat

Lanjutan tabel 2.1

14	Yuliani, tutik (2015)	Dependen : Kabupaten di Kalimantan Timur Independen : Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Kabupaten di Kalimantan Timur dan Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kabupaten di Kalimantan Timur
15	Made Suyana Utama dkk (2015)	Dependen : Kesejahteraan Masyarakat Independen : Kinerja Keuangan	Hasil Peelitian Ini tentang Kinerja Keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Bali
16	Cherrya Dhia Wenni (2012)	Dependen : Kinerja Keuangan Independen : Pendapatan Asli Daerah	Dari Penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
17	Novita dewi (2017)	Dependen Indeks pembangunan manusia Independen Pertumbuhan ekonomi	Dari penelitian ini menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
18	Andi sasmir (2018)	Dependen disparitas Independen Indeks pembangunan manusia	Dari penelitian ini menyatakan Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap disparitas

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kinerja keuangan, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah dengan variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat. Maka disusun dengan pengaruh kinerja keuangan, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Menurut Restianto (2011) Hubungan Kinerja Keuangan dengan kesejahteraan Masyarakat yaitu Kinerja Keuangan Daerah merupakan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber – sumber keuangan asli daerah untuk membiayai jalannya sistem pemerintah, pembangunan daerahnya, pelayanan masyarakat sesuai dengan batas – batas yang di tentukan dalam peraturan perundang – undangan, maka dalam penelitian ini mengambil hipotesis Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

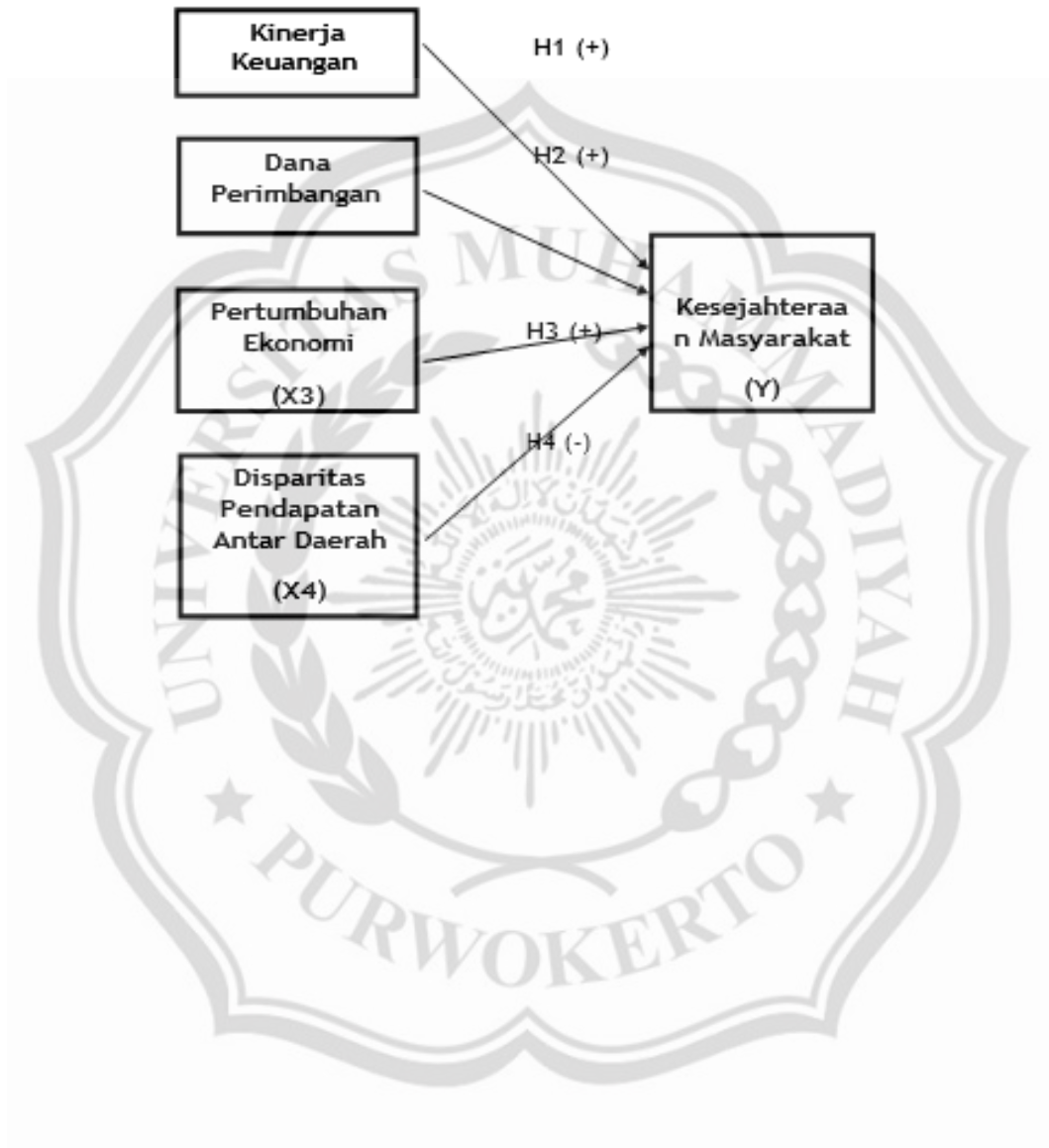
Menurut Jayastra (2015) Hubungan Dana Perimbangan dengan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, diperlukan sumber - sumber pembiayaan. Pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan Dan lain - lain pendapatan daerah yang sah, maka dalam penelitian ini mengambil hipotesis Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Menurut Mirza (2012) Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat yaitu Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, maka dalam penelitian ini mengambil hipotesis Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Menurut Patta (2012) Hubungan Disparitas Pendapatan antar Daerah dengan Kesejahteraan Masyarakat Ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan, maka dalam penelitian ini mengambil hipotesis Disparitas Pendapatan antar Daerah berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Menurut DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) yaitu Hubungan Teori Akuntabilitas dengan penelitian ini adalah bahwa teori tersebut menjelaskan kewajiban dari penguasa yang dipercayai untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat, hal ini berkaitan dengan penelitian pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Judul tersebut mengacu pada proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

Kerangka Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

1 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja Keuangan Daerah merupakan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber – sumber keuangan asli daerah untuk membiayai jalannya sistem pemerintah, pembangunan daerahnya, pelayanan masyarakat sesuai dengan batas – batas yang di tentukan dalam peraturan perundang – undangan.

Made Suryana (2015) dalam penelitian terdahulu tentang dampak kinerja keuangan daerah terhadap Kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan dampak kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan pada penelitian Restianto (2011) dalam penelitian pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Oleh karena itu hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut :

H₁ : Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, diperlukan sumber - sumber pembiayaan. Pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan dan lain - lain pendapatan daerah yang sah (Jayastra,2015).

Swandewi (2012) dalam penelitian terdahulu tentang pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di provinsi Bali dan pada penelitian Suciati (2015) dalam penelitian pengaruh Jumlah Penduduk, dana perimbangan dan investasi pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung pada Kabupaten/Kota di Bali. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif dan signifikan pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung pada Kabupaten/Kota di Bali Oleh karena itu hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut :

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, (Mirza,2012)

Sasana (2009) Dalam penelitian terdahulu tentang analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menyatakan Analisis Dampak Pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja Terserap berpengaruh positif terhadap kesejahteraan di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah dan pada penelitian Mirza (2012) tentang pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Hasil Penelitian tersebut juga menyatakan Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Oleh karena itu hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut :

H₃ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

4 Pengaruh Disparitas Pendapatan antar Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat

Ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan, (Alesina dan Rodric dalam Patta 2012).

Arka (2015) dalam penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa disparitas pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Bali dan pada penelitian Yasa (2015) dalam penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan sedangkan disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut :

H₄ : Disparitas pendapatan antar Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.